

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Rancangan perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Utara Tahun 2022 merupakan gambaran program pembangunan di Kecamatan Padang Utara yang direncanakan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024. Renja merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang terakhir telah diubah oleh Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah.

Rancangan perubahan Renja-SKPD tersebut disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 dinyatakan bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Penyusunan Rencana Kerja ditentukan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih lebih dari tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Rencana kerja (Renja) Kecamatan Padang Utara tahun 2022 ini disusun mengacu kepada pergeseran anggaran pertama yang dilakukan akibat terjadinya peningkatan Covid-19 yang terjadi di Kota Padang yang saat itu berada pada PPKM Level 3, sekaligus menyikapi adanya instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan.

Penyesuaian kegiatan berdasarkan surat Wali Kota Padang Nomor 900/01.20/BPKAD-2022 tanggal 19 Januari 2022 perihal Rasionalisasi dan Penundaan Pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022, surat Sekretaris Daerah Nomor 900/26.44/BPKAD-AGR/2022 tanggal 20 Juni 2022 serta Surat Sekretaris Daerah Nomor 900/27.99/BPKAD-AGR/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggran 2022.

Dalam hal ini diharapkan Penyusunan Perubahan Rencana kerja yang tertuang dalam tulisan ini mampu mewakili kebutuhan dan harapan masyarakat Kecamatan Padang Utara dan menjadi dasar untuk implementasi kebijakan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Utara tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20).
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6206).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Ranperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA
TAHUN 2022**

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kota Padang Tahun 2004 – 2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017).
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2019).
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan.
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kelurahan.
16. Peraturan Walikota Nomor 110 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 nomor 3, tambahan lembaran daerah nomor 118).
18. Peraturan Walikota Padang 46 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
19. Permendagri no.67 tahun 2011 tentang perubahan Permendagri nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah.
20. Peraturan Walikota Padang No. 52 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2022.
21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2019-2024.
22. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Kecamatan Padang Utara dimaksudkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan kecamatan terhadap suatu Dokumen Rencana Kerja yang bersifat tahunan, yang sangat penting peranannya sebagai arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (Stakeholders) Kecamatan Padang Utara dalam melaksanakan Program dan Kegiatan di Kecamatan Padang Utara tahun 2022.

1.3.2 Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 ditujukan untuk memeberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam bentuk kebijakan APBD Tahun 2022. Penyusunan ini juga bertujuan untuk merangsang patisipasi publik dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses penggunaan anggaran. Secara lebih sistematis, tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Diperolehnya suatu Rencana Kerja Tahunan yang sesuai dengan dengan kebutuhan di Kecamatan Padang Utara.
2. Diperolehnya program dan kegiatan yang menjadi upaya kongrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kecamatan Padang Utara.
3. Sebagai dasar untuk penyusunan Anggaran Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Renja Kecamatan Padang Utara tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD
- 2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA
TAHUN 2022**

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PADANG UTARA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan mengacu kepada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Padang Tahun 2019 – 2024. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Sesuai dengan Renstra Kecamatan Padang Utara Tahun 2019 – 2024, **Tujuan** pembangunan jangka menengah Kecamatan Padang Utara Kota Padang dirumuskan sebagai berikut : **“Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan”**, dengan indikator tujuan adalah Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat.

Sasaran organisasi adalah bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan perangkat

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA TAHUN 2022

daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program perangkat daerah. Adapaun sasaran dari Kecamatan Padang Utara adalah :

1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kecamatan.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan.

Dari pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 s.d 2019 kemudian proyeksi untuk tahun 2022 dan 2021, target indikator sasaran yang sudah direalisasikan dan ditargetkan dapat dilihat pada tabel berikut :

**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA
TAHUN 2022**

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Padang Utara Tahun 2019 – 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Sasaran					Kondisi Akhir Renstra
					Tahun 2018	Tahun 2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	77	83	84,75	85	85,25	86,75	87	87
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	Nilai SAKIP	Huruf	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	%	45	65	70	73	75	80	82	82

**RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA
TAHUN 2022**

Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Padang Utara

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
		2020	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,75	85	85,25	86,75	93,42	-	85	85,25	IKU Renstra 2019-2024
2	Nilai Sakip SKPD	BB	BB	A	A	BB	-	BB	BB	IKU Renstra 2019-2024
3	Persentase partisipasi swadaya masyarakat	70%	73%	75%	80%	60,02%	-	73%	75%	IKU Renstra 2019-2024

Disamping Kinerja Kecamatan Padang Utara sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Padang Utara sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kinerja pelayanan di Bidang Pemerintahan :

1. Mengadakan pembinaan Kepada pemerintah kelurahan OPD yang ada di Kecamatan untuk membuat taat azaz aturan hukum sebagi dasar dalam pelaksanaan tugas.
2. Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan kelurahan untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kota maupun pihak lainnya.
3. Pembinaan kelengkapan administrasi kelurahan dan kecamatan.
4. Pembinaan secara rutin ke Kelurahan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
5. Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan di kelurahan.
6. Memberikan fasilitasi yang cukup untuk setiap penyelenggaraan kegiatan rutin pemerintahan kelurahan.

Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan:

1. Melakukan penataan dan penertiban PKL karena telah di BKO kannya beberapa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ke Kecamatan
2. Monitoring pelaksanaan Musrenbang Kelurahan dan melaksanakan Musrenbang Kecamatan.
3. Monitoring Penyaluran Beras Raskin.
4. Monitoring dan fasilitasi penyerahan Bantuan BLSM di wilayah Kecamatan Padang Utara.
5. Verifikasi dan fasilitasi penyaluran dana bantuan bedah rumah kepada warga.
6. Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PKK dan Posyandu.
7. Pembinaan anggota Linmas se-Kelurahan di kecamatan Padang Timur.
8. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan "**PATEN**" merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia, berdasarkan instruksi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Maksud penyelenggaraan *PATEN* adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan *PATEN*.

NILAI-NILAI DALAM PELAYANAN PATEN DI KECAMATAN PADANG UTARA

» INTEGRITAS

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

» PROFESIONALISME

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

» PELAYANAN

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

» RAMAH TAMAH

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

» DISIPLIN

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

» ADIL / NON DISKRIMINASI

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat serta sesuai penjabaran terhadap tugas pokok dan fungsi di atas, maka jenis pelayanan di Kecamatan Padang Utara kepada Masyarakat terdiri dari 15 rekomendasi, 1 legalisasi, 1 perizinan, dan 1 surat keterangan sebagai berikut :

1. Rekomendasi

- a. Rekomendasi izin lokasi dan operasional lembaga pendidikan masyarakat luar sekolah;
- b. Rekomendasi Surat Keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar;
- c. Rekomendasi penggunaan air irigasi dan jaringan irigasi;
- d. Rekomendasi izin lokasi bagi perumahan;
- e. Rekomendasi pemasangan *billboard*, spanduk, poster, selebaran, pamflet dan umbul-umbul;
- f. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB di atas 100 M2;
- g. Rekomendasi untuk pembuatan akta pendirian badan usaha, koperasi, usaha simpan pinjam dan UKM;
- h. Rekomendasi penetapan lokasi pelaksanaan Program Padat Karya;
- i. Rekomendasi penandatanganan Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Surat Keterangan Kependudukan;
- j. Rekomendasi persyaratan untuk melaksanakan pernikahan (non Muslim);
- k. Rekomendasi pemasangan tower;
- l. Rekomendasi pembangunan rumah ibadah;
- m. Rekomendasi izin usaha kehutanan dan pertanian (peternakan, perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura);
- n. Rekomendasi permohonan izin keramaian; dan
- o. Rekomendasi tempat usaha izin gangguan.

2. Legalisasi

Legalisasi Surat Keputusan hasil musyawarah Komite Sekolah Dasar.

3. Perizinan

Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) skala s/d 100 M2.

4. Surat Keterangan

Surat Keterangan Domisili, Surat Keterangan Kematian, dan Surat Keterangan Pindah antar Kecamatan dalam Kota.

2.2 Analisis Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II

Kecamatan Padang Utara dalam menunjang kegiatan rutin dan operasional telah dialokasikan belanja/pengeluaran yang bersumber dari APBD Kota Padang yang tercantum dalam DPA SKPD Kecamatan Padang Utara Tahun 2022 sebesar Rp. 16.217.678.656,00.

Pada bulan Januari terjadi Refocusing Anggaran sebesar Rp. 799.923.150,00. Dalam refocusing anggaran tahap 1 (satu) ini dilakukan penundaan untuk kegiatan MTQ.

2.3

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

2.3.1 Sejauhmana Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Dalam era otonomi Daerah untuk mengujudkan Pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance di perlukan aparatur yang mempunyai integritas dan akuntabilitas yang tinggi. Dengan demikian SKPD Kecamatan Padang Utara terus belajar dan meningkatkan SDM aparturnya dengan cara :

1. Melakukan perbaikan motivasi kerja bagi aparatur se Kecamatan Padang Utara dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pelayanan publik, tujuannya adalah untuk merubah pola pikir aparatur agar menghasilkan pelayanan yang baik dan berorientasi pada kepuasan publik.
2. Pemberian pemahaman-pemahaman pada berbagai kesempatan kepada aparatur se Kecamatan Padang Utara untuk dapat memiliki budaya kerja yang baik, dan juga membangun kesadaran disiplin pada diri setiap pegawai dengan menetapkan ketentuan-ketentuan pola kerja yang sesuai dengan peraturan kepegawaian yang ada.
3. Berupaya bangkit dari keterpurukan dengan memprioritaskan program/kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat dan aparatur berlandaskan RPJMD Kota Padang Tahun 2019 – 2024.

Namun demikian hal kritis yang perlu mendapat perhatian bersama adalah :

- a) Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam memberikan pelayanan publik.
- b) Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan dan Kelurahan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- c) Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Lurah sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d) Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- e) Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan dan Kelurahan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- f) Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur kelurahan tentang kebijakan pemerintah kota.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi OPD

Terkait dengan permasalahan dan hambatan penyelenggaraan Tugas dan fungsi OPD kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasaran penunjang kegiatan sangat kurang seperti kendaraan dinas
2. Koordinasi antar UPTD belum dapat dilakukan secara maksimal
3. Tata kearsipan belum teratur, karena minimnya tempat penyimpanan arsip/dokumen

2.3.3 Dampaknya Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala daerah terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti SPM dan MDGS (Milenium Development Goals)

Untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan memperhatikan RPJM Nasional juga mengacu kepada RPJP Daerah dan berdasarkan beberapa pertimbangan-pertimbangan maka Pemerintah Kota Padang menetapkan Visi pembangunan Kota Padang, untuk lima tahun kedepan yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Kota Padang Yang Madani Berbasis Pendidikan, Perdagangan dan Pariwisata Unggul Serta Berdaya Saing”**

Visi ini dijabarkan kedalam enam misi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kretaif, inovatif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan Kota Padang yang unggul, aman, bersih, tertib, bersahabat dan menghargai kearifan lokal.
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Padang yang inklusif.
4. Mewujudkan Kota Padang sebagai pusat perdagangan dan ekonomi kreatif.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.
6. Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana.
7. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang berkaitan dengan pencapaian visi, misi, program dan kegiatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dihadapkan kepada kajian yang menjadi bahan pertimbangan , adapun yang menjadi kajian tersebut adalah faktor pendorong dan penghambat terhadap pencapaian visi, misi, program dan kegiatan Kepala Daerah Terpilih dan wakil Kepala daerah terpilih.

2.3.4 Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan OPD

A. Tantangan

Beberapa tantangan yang mempengaruhi Kecamatan Padang Utara adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kemampuan aparatur di OPD Kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai perpanjangan tangan untuk urusan administrasi dan atau pelayanan umum sehingga dapat terbentuk budaya kerja yang produktif dan terhindar dari pelayanan dengan administrasi rumit serta berbiaya tinggi sehingga dapat peningkatan kapasitas kemampuan kecamatan dan kelurahan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat yang pada akhirnya dapat menarik kepercayaan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pembangunan.
2. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.
3. Kecamatan Padang Utara sebagai daerah rawan bencana gempa, tsunami dan banjir disebabkan karakteristik daerahnya yang sebagian besar terletak pada pesisir pantai, sangat perlu memberikan pengembangan wawasan peduli bencana dan penataan lingkungan yang sehat dan untuk dapat memberikan kehidupan dan lingkungan yang baik bagi generasi mendatang.
4. Peningkatan kesejahteraan terkait dengan pengembangan potensi wilayah yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui upaya investasi.

B. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Padang Utara dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis dapat meningkatkan peran Kecamatan Padang Utara dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Padang Utara untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan;
- c. Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Padang Utara;
- d. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai;
- e. Mudahnnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan dengan kemajuan jaman, media informasi dari segala jenis mudah didapat di Kecamatan Padang Utara, terutama dilihat dari posisi strategis wilayahnya. Hal ini dapat dipergunakan untuk lebih memperluas informasi untuk mengenalkan potensi Kecamatan Padang Utara.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa rekomendasi dan Catatan yang Strategis untuk ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas tahun yang direncanakan

Rencana Program dan Kegiatan merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan, namun demikian sudah barang tentu sebaik-baiknya program dan kegiatan yang direncanakan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didukung oleh perangkat aturan sebagai regulasi dasar pelaksanaan teknis dilapangan. Oleh karena itu hal-hal yang perlu dilakukan kedepan diusulkan :

1. Tersedianya sarana dan Prasarana kerja yang memadai
2. Penambahan Pegawai untuk kelancaran pelayanan
3. Dilakukan pelatihan khusus bagi aparatur kecamatan dan kelurahan dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pola perencanaan evaluasi dan pelaporan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

RENJA PERUBAHAN KECAMATAN PADANG UTARA TAHUN 2022

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2022 terdapat dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Pembangunan Tingkat Kelurahan. Program ini akan dilaksanakan pada Minggu ke-4 Bulan Januari tahun 2021 . Diawali dengan rembuk warga kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi pembangunan tingkat kelurahan. Program dan kegiatan yang diusulkan mulai dari tingkat RW akan dibawa ke Rakorbang Kelurahan dan kemudian diteruskan ke musyawarah pembangunan tingkat kecamatan dan akan dipilih kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 baik oleh Kelurahan, Kecamatan ataupun diteruskan ke OPD yang terkait di Pemko Padang. Seluruh usulan pembangunan tingkat kelurahan tersebut akan dimasukkan ke dalam aplikasi SIPD Kemendagri.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Beberapa pengimplementasian kebijakan –kebijakan Pemerintah yang dilakukan Kecamatan Padang Utara adalah :

- Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), merupakan suatu sistem pelayanan berstandar nasional terhadap masyarakat pada lingkup Pemerintah Kecamatan yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Maksud penyelenggaraan **PATEN** adalah mewujudkan Pemerintah Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul bagi Kantor/Badan/Dinas pelayanan terpadu di Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia, dengan Tujuan Utama untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dibawah koordinasi dan binaan Camat selaku penanggung jawab penyelenggaraan **PATEN**. Nilai-nilai dalam pelayanan PATEN di Kecamatan Padang Utara :

» **INTEGRITAS**

Berfikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

» **PROFESIONALISME**

Bekerja dengan tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik, penuh tanggung jawab serta komitmen yang tinggi.

» **PELAYANAN**

Berupaya untuk memberikan pelayanan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan mudah guna memenuhi kepuasan masyarakat.

» **RAMAH TAMAH**

Mengupayakan perilaku yang ramah tamah dan budaya senyum dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

» **DISIPLIN**

Aparatur kecamatan dalam melakukan tugasnya bekerja sesuai dengan tugas waktu kerja dan aturan yang telah ditetapkan.

» **ADIL / NON DISKRIMINASI**

Tidak memberikan perilaku yang berbeda-beda dalam pelayanan kepada masyarakat.

- **PP No. 17 tahun 2018 Tentang Kecamatan**

Disebutkan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Dan Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Wilayah Kecamatan Padang Utara meliputi tujuh kelurahan yaitu, Kelurahan Lolong Belanti, Kelurahan Ulak Karang Utara, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kelurahan Air Tawar Barat, Kelurahan Air Tawar Timur, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kelurahan Gunung Pangilun. Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2018 juga menyebutkan tentang Fungsi Camat dan lurah, pembentukan kecamatan dan kelurahan, penggabungan kecamatan dan kelurahan, penyesuaian batas kecamatan dan kelurahan. Pada bagian kedelapan pasal 15 dan 16 disebutkan tentang forum koordinasi Pimpinan kecamatan. Pada Kecamatan Padang Utara untuk forum koordinasi Pimpinan kecamatan sudah dianggarkan pada Program Pemberdayaan Masyarakat kegiatan Koordinasi Lintas Kelembagaan sebesar Rp. 45.000.000 untuk tahun 2022. Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan tentang Pendanaan Kecamatan dan Kelurahan. Disebutkan pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Alokasi tersebut masuk dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran kelurahan dengan lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

- **Permendagri No. 130 tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.** Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 ini mengatur dua substansi pokok, yaitu pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan sebagai pedoman pengelolaan kegiatan yang bersumber dari dana kelurahan. Di Kecamatan Padang Utara Kegiatan pembangunan sarana dan prasaranan

kelurahan digunakan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, transportasi, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, digunakan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi sumber daya sendiri. " Kegiatan pemberdayaan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 130, yaitu: pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat; pendidikan dan kebudayaan: pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah; lembaga kemasyarakatan; Trantibum dan Linmas; penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa. Untuk penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan. Dalam mekanisme penganggarannya pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan. "Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Untuk Kecamatan Padang Utara anggarannya di bebaskan pada dua Program kegiatan yaitu Program Pembangunan Sarana dan Prasarana pada kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) sebesar : Rp. 2.154.236.000. dan Program Pemberdayaan masyarakat pada Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (DAU T) sebesar Rp. 437.080.000. Anggaran (DAU T) tidak dilaksanakan pada tahun 2020 karena terjadi refocusing.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Padang Utara tahun 2022 adalah implementasi Misi Pemerintah Daerah Kota Padang. Dari 7 Misi yang ditetapkan Kepala Daerah Kota Padang ada 3 Misi yang dilaksanakan Kecamatan Padang Utara, sebagai berikut :

1. Misi ke 2 (dua) Mewujudkan Kota Padang Yang Unggul, Aman, Bersih, Tertib, Bersahabat dan Menghargai Kearifan Lokal ,
2. Misi ke 6 (enam) Menciptakan masyarakat sadar, peduli dan tangguh bencana, dan
3. Misi ke 7 (tujuh) Meningkatkan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Yang Bersih dan Pelayanan Publik yang Prima berkaitan langsung dengan Tugas Pokok, dan Fungsi Kecamatan Padang Utara yaitu Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan.

A. Sasaran dan Indikator Sasaran

- Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pauh dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Perumusan sasaran harus memiliki kriteria "SMART". Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*).
- Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

**Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan Padang Utara Tahun 2022-2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Sasaran	
				2022	2023
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat di	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan	Nilai indeks kepuasan masyarakat	85,25	86,75
			Nilai SAKIP Kecamatan	A	A
			IKM Kecamatan	84	85

RENJA KECAMATAN PADANG UTARA TAHUN 2022

	Kecamatan	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kecamatan	Persentase terlaksananya usulan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang diakomodir Kecamatan	75	80
--	-----------	---	--	----	----

1.3 Program dan Kegiatan

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Pauh, sesuai Renstra Kecamatan Pauh Tahun 2019-2024, untuk tahun 2022 ada 6 program, 16 kegiatan dan 50 sub kegiatan yang diusulkan. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan tersebut dapat dilihat pada tabel TC 33

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Awal Rencana kerja (Ranwal -Renja) Kecamatan Padang Utara Tahun 2022 merupakan awal proses penyusunan rancangan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk penyempurnaan penyusunan RKPD 2022. Rancangan Awal ini merupakan rumusan rencana program kegiatan tahunan yang disusun pada Revisi Renstra SKPD 2019 - 2024. Rancangan Awal ini nantinya akan dirumuskan kembali sesuai program unggulan dan visi misi Walikota – Wakil Walikota untuk dientrikan pada sistem aplikasi SIPD. Adapun Rancangan program kegiatan dimaksud yang direncanakan untuk TA 2022 bisa dilihat pada tabel TC 33.

Tabel 4.1 (TC.33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023

KOTA PADANG

SKPD : KECAMATAN PADANG UTARA

Permendagri : 90

NO	Kode	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023		KET	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	7.01	KECAMATAN PADANG UTARA				16.898.560.000				20.365.025.899		
1	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	Kec. Padang Utara	100	%	285.000.000	APBD		100	%	450.000.000
	7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/ monitoring penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Kec. Padang Utara	12	kali	95.000.000	APBD		12	kali	160.000.000

7.01.0 2.2.01 .01	Koordinasi/siner gi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan perangkat daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan fasilitas kebencanaan tingkat Kelurahan yang dilakukan (kali)	Kec. Padang Utara	7	Kelurahan	45.000.000	APBD		7	Kelurahan	45.000.000	
7.01.0 2.2.01 .02	Peningkatan efektifitas kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/pembinaan terkait administrasi Pemerintahan	Kec. Padang Utara	12	kali	50.000.000	APBD		12	kali	115.000.000	
7.01. 02.2. 02	Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah permohonan pada Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani	Kec. Padang Utara	1400	permohonan	60.000.000	APBD		1600		150.000.000	
7.01.0 2.2.02 .03	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah permohonan pada Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) yang dilayani	Kec. Padang Utara	1400	permohonan	60.000.000	APBD		1600	permohonan	150.000.000	

	7.01.02.2.04	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah monitoring perizinan bangunan	Kec. Padang Utara	84	kali	130.000.000	APBD		84	kali	140.000.000	
	7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Jumlah monitoring perizinan bangunan	Kec. Padang Utara	84	kali	130.000.000	APBD		84	kali	140.000.000	
2	07.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	Kec. Padang Utara	75	persentase	1.824.000.000	APBD		80	persentase	5.919.522.926	
	7.01.03.2.02	Kegiatan pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kec. Padang Utara	35	Kegiatan	1.799.000.000	APBD		40	Kegiatan	5.829.132.934	
	7.01.03.2.02.01	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah	Jumlah kegiatan rakorbang Kelurahan dan musrenbang Kecamatan yang	Kec. Padang Utara	8	Kegiatan	150.000.000	APBD		8	Kegiatan	150.000.000	

		perencanaan pengembangan di Kelurahan	dilaksanakan tepat waktu										
	7.01.0	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	Kec. Padang Utara	35	Lokasi	1.237.000.000	APBD		40	Lokasi	2.851.816.934	
	3.2.02.02		Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir (DAU-T)	Kec. Padang Utara	7	Lokasi	0	APBD		7	Lokasi	2.154.236.000	
	7.01.0	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang diikuti	Kec. Padang Utara	7	Kegiatan	372.000.000	APBD		7	Kegiatan	191.000.000	
	3.2.02.03		Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan (DAU-T)	Kec. Padang Utara	10	Kegiatan	0	APBD		10	Kegiatan	437.080.000	
	7.01.0	Evaluasi Kelurahan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	Kec. Padang Utara	12	Kali	40.000.000	APBD		12	Kali	45.000.000	
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	Kec. Padang Utara	8	Kegiatan	25.000.000	APBD		8	Kegiatan	90.389.992	

	7.01.0 3.2.03 .04	Facilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	Kec. Padang Utara	8	Kegiatan	25.000.000	APBD		8	Kegiatan	90.389.992	
3	07.0 1.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Padang Utara	100	persentase	55.000.000	APBD		100	Persentase	75.000.000	
	7.01. 04.2. 02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Padang Utara	56	Kali	55.000.000	APBD		56	Kali	75.000.000	
	7.01.0 4.2.02 .01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Pengakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik	Jumlah frekuensi monitoring trantibmas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dan Kelurahan	Kec. Padang Utara	56	Kali	55.000.000	APBD		56	Kali	75.000.000	

		Indonesia											
4	07.0 1.05	PROGRAM PENYELENGG ARAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Persentase lembaga keagamaan yang dibina	Kec. Padang Utara	100	persent ase	1.593.000.00 0	APBD		100	pers enta se	1.200.000.00 0	
	7.01. 05.2. 01	Penyelenggar aan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase lembaga kemasyarakata n yang dibina	Kec. Padang Utara	100	Persent ase	1.593.000.00 0	APBD		100	Pers enta se	1.200.000.00 0	
	7.01.0 5.2.01 .07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan	Kec. Padang Utara	5	Kali	1.543.000.000	APBD		4	Kali	1.150.000.000	
			Jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan	Kec. Padang Utara	9	Cabang		APBD		0	Caba ng	0	
	7.01.0 5.2.01 .08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi forkopimca yang dilakukan	Kec. Padang Utara	24	Kali	50.000.000	APBD		24	Kali	50.000.000	

5	07.0 1.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	Kec. Padang Utara	100	persentase	1.960.000.000	APBD		100	persentase	2.100.000.000	
	7.01.06.2.01	Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kec. Padang Utara	12	Kali	1.960.000.000	APBD		12	Kali	2.100.000.000	
	7.01.06.2.01.12	Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi/rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Kec. Padang Utara	12	Kali	1.960.000.000	APBD		12	Kali	2.100.000.000	
6	07.0 1.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Kec. Padang Utara	A	Nilai	11.181.560.000	APBD		A	Nilai	10.620.502.973	

	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan	Kec. Padang Utara	22	Dokumen	116.000.000	APBD		22	Dokumen	189.000.000	
	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat Daerah yang disusun	Kec. Padang Utara	2	Dokumen	25.000.000	APBD		2	Dokumen	40.000.000	
	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Kec. Padang Utara	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	21.000.000	
	7.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD yang disusun	Kec. Padang Utara	1	Dokumen	10.000.000	APBD		1	Dokumen	21.000.000	
	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Kec. Padang Utara	1	Dokumen	8.000.000	APBD		1	Dokumen	21.000.000	
	7.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Kec. Padang Utara	1	Dokumen	8.000.000	APBD		1	Dokumen	21.000.000	
	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. Padang Utara	12	Laporan	30.000.000	APBD		12	Laporan	35.000.000	

		Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	SKPD										
7.01.0 1.2.01 .07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kec. Padang Utara	4	Kegiatan	25.000.000	APBD		4	Kegiatan	30.000.000		
7.01.01.2.02	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan adminstrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Kec. Padang Utara	12	Laporan	9.148.962.000	APBD		12	Laporan	8.091.581.441		
7.01.0 1.2.02 .01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	Kec. Padang Utara	80	Orang	8.848.962.000			80	Orang	7.746.581.441		
7.01.0 1.2.02 .02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas	Kec. Padang Utara	15	Orang	300.000.000	APBD		15	Orang	325.000.000		
7.01.0 1.2.02 .04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi dan keuangan SKPD	Kec. Padang Utara	12	Laporan	0	APBD		12	Laporan	20.000.000		
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah waktu adminstrasi barang milik daerah yang terlaksana	Kec. Padang Utara	12	Laporan	105.000.000	APBD		12	Laporan	125.000.000		

7.01.0 1.2.03 .02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah bulan pengamanan milik daerah SKPD	Kec. Padang Utara	12	Bulan	90.000.000	APBD		12	Bulan	105.000.000	
7.01.0 1.2.03 .05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Kec. Padang Utara	12	Laporan	15.000.000	APBD		12	Lapor an	20.000.000	
7.01. 01.2. 05	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan adminstrasi kepegawaian perangkat daerah	Kec. Padang Utara	80	Orang	50.000.000	APBD		80	Oran g	165.000.000	
7.01.0 1.2.05 .02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut perlengkapannya yang diadakan	Kec. Padang Utara	80	Stel	0	APBD		80	Stel	80.000.000	
7.01.0 1.2.05 .10	Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang- undangan	Kec. Padang Utara	80	Orang	50.000.000	APBD		80	Oran g	85.000.000	
7.01. 01.2. 06	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan adminstrasi umum yang akuntabel	Kec. Padang Utara	12	Laporan	448.000.000	APBD		12	Lapo ran	550.000.000	
7.01.0 1.2.06 .01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. Padang Utara	10	Jenis	15.000.000	APBD		10	Jenis	20.000.000	

		an Bangunan Kantor	yang disediakan									
7.01.0 1.2.06 .02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Padang Utara	10	Jenis	25.000.000	APBD		25	Jenis	40.000.000	
7.01.0 1.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Padang Utara	36	Jenis	55.000.000	APBD		36	Jenis	70.000.000	
7.01.0 1.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kec. Padang Utara	8	Jenis	52.000.000	APBD		8	Jenis	82.000.000	
7.01.0 1.2.06 .06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah koran yang disediakan	Kec. Padang Utara	120 x 12	eksamplar	16.000.000	APBD		120 x 12	eksp	20.000.000	
7.01.0 1.2.06 .08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dijamu	Kec. Padang Utara	800	Orang	10.000.000	APBD		900	Orang	18.000.000	
7.01.0 1.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi	Kec. Padang Utara	96	Kali	260.000.000	APBD		96	Kali	70.000.000	
		Jumlah konsultasi SKPD	Kec. Padang Utara	15	Kali		APBD		15	Kali	200.000.000	
7.01.0 1.2.06 .10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang tersusun	Kec. Padang Utara	1	Kegiatan	15.000.000	APBD		1	Kegiatan	30.000.000	

	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Padang Utara	8	Unit	80.000.000	APBD		6	Unit	274.000.000	
	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Kec. Padang Utara	2	Unit	0	APBD		2	Unit	60.000.000	
	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Kec. Padang Utara	15	Unit	15.000.000	APBD		15	Unit	99.000.000	
	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah item jenis barang peralatan kantor yang disediakan	Kec. Padang Utara	4	unit	15.000.000	APBD		4	unit	65.000.000	
	7.01.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang disewakan	Kec. Padang Utara	1		30.000.000	APBD		0		0	
	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Kec. Padang Utara	2	Unit	20.000.000	APBD		3	unit	50.000.000	
	7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan	Kec. Padang Utara	2	Unit	0	APBD		0		0	

		atau Bangunan lainnya	lainnya yang diadakan										
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Padang Utara	12	Bulan	498.098.000	APBD		12	Kegiatan	512.021.532		
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Kec. Padang Utara	1050	Lembar	4.500.000	APBD		1050	Lembar	4.500.000		
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Padang Utara	3 x 12	Rek tag/bln	295.598.000	APBD		3 x 12	Rek tag/bln	303.791.532		
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor	Kec. Padang Utara	6 x 12	Org / bln	198.000.000	APBD		6 x 12	Org / bln	203.730.000		
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah	Kec. Padang Utara	12	Unit	735.500.000	APBD		12	Unit	713.900.000		
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan	jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/ berkala dan dibayarkan	Kec. Padang Utara	1	Unit	25.000.000	APBD		1	Unit	25.000.000		

		Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pajaknya										
7.01.0 1.2.09 .02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	Kec. Padang Utara	21	Unit	135.000.000	APBD		22	Unit	150.500.000	
7.01.0 1.2.09 .05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeluer yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Kec. Padang Utara	10	Unit	7.500.000	APBD		10	Unit	8.250.000	
7.01.0 1.2.09 .06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kec. Padang Utara	20	Unit	10.000.000	APBD		20	Unit	16.000.000	
7.01.0 1.2.09 .09		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah CS, jumlah bulan yang dibayarkan	Kec. Padang Utara	7 x 12	Org x bln	545.000.000	APBD		10 x 12	Org x bln	330.850.000	
			Jumlah rumah dinas yang dipelihara (unit)	Kec. Padang Utara	1	Unit		APBD		1	Unit	50.000.000	
			Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. Padang Utara	2	Jumlah gedung		APBD		2	Jumlah gedung	105.000.000	

			Jumlah alat kebersihan yang disediakan	Kec. Padang Utara	23	Item		APBD		23	Item	10.000.000	
7.01.0 1.2.09 .10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Kec. Padang Utara	15	Unit	10.000.000	APBD			15	Unit	15.000.000	
7.01.0 1.2.09 .11	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	Kec. Padang Utara	2	Unit	3.000.000	APBD			2	Unit	3.300.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Padang Utara Tahun 2022 memuat prioritas pembangunan dan rancangan kerangka ekonomi makro serta yang bersifat indikatif. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Penyusunan program/kegiatan pembangunan sebagai acuan dalam mengambil kebijakan serta implementasi atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat daerah Kota Padang yang merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintah Kota Padang.

Sebagai pelayanan masyarakat, Pemerintah Kecamatan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara prima dan menampung aspirasi serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan. Melalui perubahan rencana kerja ini diharapkan sudah dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat walaupun tidak semuanya dapat terpenuhi karena Pemerintah juga memiliki keterbatasan khususnya dalam hal penyediaan anggaran kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Padang Utara Tahun 2022 ini disusun, semoga dapat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Padang Tahun 2022 oleh Tim Pemko Padang.

Padang, Maret 2021

C A M A T

FAJAR SUKMA, S. Pd
NIP. 19720601 200801 1 002

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2022

KOTA PADANG

KECAMATAN PADANG UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan)											Prakiraan Maju Tahun 2023		Jenis Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab					
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c						
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
Bagian Keuangan																							
7	01	01								10.912.021.499,00	10.204.100.924,00	707.920.575,00				11.244.962.000,00							
7	01	01	2.01							92.500.850,00	32.278.800,00	60.222.050,00				173.000.000,00							
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun (dokumen)				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	2	2	16.140.100,00	9.583.000,00	6.557.100,00	PAD	PAD	2	30.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	1	1	10.697.000,00	1.389.200,00	9.307.800,00	PAD	PAD	1	21.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	1	1	10.780.500,00	1.472.700,00	9.307.800,00	PAD	PAD	1	21.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.04	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen DPA SKPD yang disusun				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	1	1	8.034.750,00	3.834.750,00	4.200.000,00	PAD	PAD	1	18.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.05	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang disusun				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	1	1	8.381.300,00	2.431.450,00	5.949.850,00	PAD	PAD	1	18.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.06	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja dibuat	Jumlah laporan capaian dan realisasi kinerja dibuat				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	18	18	20.519.200,00	8.496.950,00	12.022.250,00	PAD	PAD	12	35.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.07	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah				Kecamatan Padang Utara	Kecamatan Padang Utara	2	2	17.948.000,00	5.070.750,00	12.877.250,00	PAD	PAD	2	30.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										9.100.704.813,00	8.590.243.880,00	510.460.933,00				9.148.962.000,00		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	Jumlah ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan						75	75	8.826.144.813,00	8.315.683.880,00	510.460.933,00	PAD	PAD	80	8.848.962.000,00		Keuangan
7	01	01	2.03	02	Penyediaan Admintrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan administrasi pelaksanaan tugas ASN						15	10	274.560.000,00	274.560.000,00	-	PAD	PAD	15	300.000.000,00		Keuangan
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										94.512.000,00	92.517.750,00	1.994.250,00				105.000.000,00		
7	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengamanan Kantor/Security yang dibayarkan gajinya	Jumlah Pengamanan Kantor/Security yang dibayarkan gajinya						24	24	84.912.000,00	84.912.000,00	-	PAD	PAD	24	90.000.000,00		Umum
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD						12	12	9.600.000,00	7.605.750,00	1.994.250,00	PAD	PAD	12	15.000.000,00		Umum
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah										316.729.790,00	278.939.133,00	37.790.657,00				441.000.000,00		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan						8	8	13.398.112,00	10.417.312,00	2.980.800,00	PAD	PAD	10	18.000.000,00		Umum
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan						30	30	42.412.378,00	42.339.578,00	72.800,00	PAD	PAD	36	60.000.000,00		Umum
7	01	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan						8	8	42.703.250,00	35.826.668,00	6.876.582,00	PAD	PAD	8	55.000.000,00		Umum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2023		Jenis Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
7	01	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	Jumlah bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia					2880	2880	16.000.000,00	16.000.000,00	-	PAD	PAD	2880	16.000.000,00		Umum
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dijamu	Jumlah tamu yang dijamu					192	120	9.984.000,00	4.749.000,00	5.235.000,00	PAD	PAD	224	12.000.000,00		Umum
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Konsultasi SKPD yang dilakukan	Jumlah Konsultasi SKPD yang dilakukan					15	15	187.392.000,00	168.554.825,00	18.837.175,00	PAD	PAD	15	265.000.000,00		Umum
						Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan	Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan					96	96			-			96			
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang tersusun	Jumlah dokumen arsip yang tersusun					1	1	4.840.050,00	1.051.750,00	3.788.300,00	PAD	PAD	1	15.000.000,00		Umum
																-						
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									48.469.111,00	38.469.111,00	10.000.000,00				102.000.000,00		
8	01	01	2.08	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah mebel yang diadakan					9	5	14.261.275,00	14.261.275,00	-	PAD	PAD	15	80.000.000,00		Umum
9	01	01	2.09	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah item jenis barang peralatan dan kantor yang disediakan	Jumlah item jenis barang peralatan dan kantor yang disediakan					3	3	14.828.620,00	14.828.620,00	-	PAD	PAD	-			Umum
10	01	01	2.10	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan rumah dinas yang diadakan (unit)	Jumlah peralatan rumah dinas yang diadakan (unit)					1	0	19.379.216,00	9.379.216,00	10.000.000,00	PAD	PAD				Umum
						Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan					2	2			-			3	22.000.000,00		
																-						
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									511.619.560,00	470.876.868,00	40.742.692,00				499.500.000,00		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	Jumlah materai yang disediakan					450	450	4.500.000,00	4.500.000,00	-	PAD	PAD	450	4.500.000,00		Umum
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik					36	36	295.597.960,00	254.855.268,00	40.742.692,00	PAD	PAD	36	275.000.000,00		Umum
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan gajinya					72	72	211.521.600,00	211.521.600,00	-	PAD	PAD	72	220.000.000,00		Keuangan
																-						
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									747.485.375,00	700.775.382,00	46.709.993,00				775.500.000,00		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala dan dibayarkan pajaknya	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala dan dibayarkan pajaknya					1	1	19.000.000,00	19.000.000,00	-	PAD	PAD	1	25.000.000,00		Umum
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya					22	22	116.500.000,00	116.500.000,00	-	PAD	PAD	22	135.000.000,00		Umum
7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeluer yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah mebeluer yang mendapat pemeliharaan rutin/berkala					6	6	7.500.000,00	5.000.000,00	2.500.000,00	PAD	PAD	10	7.500.000,00		Umum
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara					21	21	14.770.000,00	6.490.000,00	8.280.000,00	PAD	PAD	20	10.000.000,00		Umum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2023		Jenis Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab	
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		a/b/c
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	jumlah alat kebersihan yang disediakan	jumlah alat kebersihan yang disediakan			20	20	576.055.375,00	543.155.382,00	32.899.993,00	PAD	PAD	23	580.000.000,00		Umum		
						Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara			3	3			-			2					
						Jumlah tenaga kebersihan yang diadakan dan dibavarkan gainnya	Jumlah tenaga kebersihan yang diadakan dan dibavarkan gainnya			108	108			-			108					
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara			14	10	10.310.000,00	7.280.000,00	3.030.000,00	PAD	PAD	15	15.000.000,00		Umum		
7	01	01	2.09	11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara			4	4	3.350.000,00	3.350.000,00	-	PAD	PAD	2	3.000.000,00		Umum		
7	01	02			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik								143.446.000,00	73.960.513,00	69.485.487,00				140.000.000,00			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								20.823.300,00	9.835.905,00	10.987.395,00				45.000.000,00			
7	01	02	2.01	01	Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan fasilitasi kebencanaan tingkat Kelurahan yang dilakukan	Jumlah kegiatan fasilitasi kebencanaan tingkat Kelurahan yang dilakukan			24	24	20.823.300,00	9.835.905,00	10.987.395,00	PAD	PAD	7	45.000.000,00		Trantib		
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan								37.892.600,00	21.469.595,00	16.423.005,00				60.000.000,00			
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayanan administrasi terpaduKecamatan (PATEN) yang dilayani	Jumlah pelayanan administrasi terpaduKecamatan (PATEN) yang dilayani			5	5	37.892.600,00	21.469.595,00	16.423.005,00	PAD	PAD	5	60.000.000,00		Pem		
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat								84.730.100,00	42.655.013,00	42.075.087,00				35.000.000,00			
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah monitoring perizinan bangunan	Jumlah monitoring perizinan bangunan			24		84.730.100,00	42.655.013,00	42.075.087,00	PAD	PAD	24	35.000.000,00		PP		
7	01	03			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan								1.793.506.207,00	1.633.349.246,00	160.156.961,00				2.089.897.899,00			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan								1.769.520.407,00	1.620.923.666,00	148.596.741,00				2.064.897.899,00			
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu			8	8	147.707.800,00	147.707.800,00	-	PAD	PAD	8	150.000.000,00		PM		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir			35	35	1.248.117.857,00	1.149.773.388,00	98.344.469,00	PAD	PAD	35	1.519.897.899,00		PM		
					Jumlah bantuan sarana dan prasarana PWRI yang diakomodir	Jumlah bantuan sarana dan prasarana PWRI yang diakomodir			3	3			-									
					Jumlah perbaikan pos pemuda di kelurahan dan sarana prasarana kantor LPM	Jumlah perbaikan pos pemuda di kelurahan dan sarana prasarana kantor LPM			3	3			-									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2022 (Tahun Berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2023		Jenis Kegiatan	Unit Kerja Penanggung Jawab		
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kelompok Sasaran		Lokasi		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif	a/b/c
								Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Jumlah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
7	01	03	2.02	02	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan					5	5	347.549.850,00	306.663.525,00	40.886.325,00	PAD	PAD	5	350.000.000,00		Kesos
						Jumlah buku pustaka untuk Kelurahan Ulak Karang Selatan yang tersedia	Jumlah buku pustaka untuk Kelurahan Ulak Karang Selatan yang tersedia					1	1			-						
7	01	03	2.02	03	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kali monitoring yang dilakukan	Jumlah kali monitoring yang dilakukan					12	12	26.144.900,00	16.778.953,00	9.365.947,00	PAD	PAD	12	45.000.000,00		Pem
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan									23.985.800,00	12.425.580,00	11.560.220,00				25.000.000,00		
7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan pembinaan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan					1	1	23.985.800,00	12.425.580,00	11.560.220,00	PAD	PAD	1	25.000.000,00		PM
7	01	04			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									23.534.900,00	13.956.900,00	9.578.000,00				55.000.000,00		
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah									23.534.900,00	13.956.900,00	9.578.000,00				55.000.000,00		
7	01	04	2.02	01	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah frekuensi monitoring tranribmas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah frekuensi monitoring tranribmas yang dilakukan oleh aparat Kecamatan dan Kelurahan					12	12	23.534.900,00	13.956.900,00	9.578.000,00	PAD	PAD	12	55.000.000,00		Trantib
7	01	05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									1.454.941.350,00	993.214.013,00	461.727.337,00				1.455.000.000,00		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah									1.454.941.350,00	993.214.013,00	461.727.337,00				1.455.000.000,00		
7	01	05	2.01	07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan	Jumlah koordinasi dengan lembaga keagamaan					5	5	1.398.088.550,00	941.478.300,00	456.610.250,00	PAD	PAD	5	1.400.000.000,00		Kesos
						Jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan	Jumlah cabang lomba MTQ yang dilaksanakan					9	0			-						
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah rapat koordinasi forkopimca yang dilakukan	Jumlah rapat koordinasi forkopimca yang dilakukan					24	24	56.852.800,00	51.735.713,00	5.117.087,00	PAD	PAD	24	55.000.000,00		Trantib
7	01	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									1.890.228.700,00	1.846.123.274,00	44.105.426,00				1.900.000.000,00		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									1.890.228.700,00	1.846.123.274,00	44.105.426,00				1.900.000.000,00		
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah koordinasi / rapat terkait pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	Jumlah koordinasi / rapat terkait fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan					12	12	1.890.228.700,00	1.846.123.274,00	44.105.426,00	PAD	PAD	12	1.900.000.000,00		PM

Formulir E.81
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KOTA PADANG
KECAMATAN PADANG UTARA
 Periode Pelaksanaan : TRIWULAN II TAHUN 2022

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang mengacu pada sasaran RKPD :

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket	
				5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		16	17	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 (BB)	16.162.356.607	100	8.834.498.298	BB	100	10.912.021.499		1.596.001.395		2.752.184.810					100	4.348.186.205		13.182.684.503	100	81,56		
		2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	127	107.000.000		107.326.650	26	doku men	92.500.850	6	7.591.350	8	19.354.550					14	26.945.900	0	134.272.550	0,00	125,49		
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	11	20.000.000	6	18.077.250	2	doku men	16.140.100	1	1.800.000	1	7.783.000					2	9.583.000	8	27.660.250	72,73	138,30		
		02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD	4	8.000.000	0	9.795.000	1	doku men	10.697.000	0	-	-	-					0	-	0	9.795.000	0,00	122,44		
		03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	8.000.000	0	9.780.000	1	doku men	10.780.500	0	-	0	-					0	-	0	9.780.000	0,00	122,25		
		04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD	4	8.000.000	0	6.284.400	1	doku men	8.034.750	1	2.492.600	0	1.342.150					1	3.834.750	1	10.119.150	25,00	126,49		
		05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	8.000.000	0	7.950.000	1	doku men	8.381.300	0	-	1	2.079.300					1	2.079.300	1	10.029.300	25,00	125,37		
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90	30.000.000	6	27.720.000	18	lapora n	20.519.200	4	3.298.750	5	3.751.100					9	7.049.850	15	34.769.850	16,67	115,90		
		07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10	25.000.000	2	27.720.000	2	lapora n	17.948.000	0	-	1	4.399.000					1	4.399.000	3	32.119.000	30,00	128,48		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	48	9.375.264.813	100	7.264.176.158	12	lapora n	9.100.704.813	3	1.441.611.754		2.284.462.330					3	3.726.074.084	103	10.990.250.242	214,58	117,23		
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangannya	300	9.100.704.813	75	7.049.926.158	75	orang	8.826.144.813	75	1.387.431.754	75	2.218.522.330					75	3.605.954.084	150	10.655.880.242	50,00	117,09		
		02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah ASN yang disediakan Administrasi Pelaksanaan Tugas	60	274.560.000	0	214.250.000	15	orang	274.560.000	15	54.180.000	10	65.940.000					15	120.120.000	15	334.370.000	25,00	121,78		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13 = 6 + 12	14 = 13/5*100%		
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5*100%	16	17	
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah pada perangkat daerah yang dikelola dengan baik	32	102.000.000	100	111.974.350	8	lokasi	94.512.000	8	-	27.198.768					8	27.198.768	108	139.173.118	337,50	136,44			
			02	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah Pengamanan Kantor/ security Yang Dibayarkan Gajinya	96	92.000.000	2	88.127.600	2	orang /bulan	84.912.000	0	-	25.698.768				2	25.698.768	4	113.826.368	4,17	123,72			
			04	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan monitoring aset yang dibuat	8	10.000.000	0	-	12	laporan	9.600.000	0	-	1.500.000				1	1.500.000	1	1.500.000	12,50	15,00			
			04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		8	10.000.000	0	23.846.750	12	laporan	9.600.000	0	-	1.500.000				1	1.500.000	1	25.346.750	12,50	253,47			
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	2.05		Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	48	679.073.000	12	530.633.600	12	bulan	454.625.642		60.678.792	125.585.897					0	186.264.689	12	716.898.289	25,00	105,57			
			10	Sosialisasi Perundang-undangan	Jumlah jenis Komponen	28	15.000.000	8	30.578.000	8	jenis	13.398.112	2	1.897.000	3	4.158.000				7	6.055.000	15	36.633.000	53,57	244,22		
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel	48	516.615.000	12	328.410.600	12	bulan	316.729.790		40.979.396	75.466.773					0	116.446.169	12	444.856.769	25,00	86,11			
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	28	15.000.000	8	30.578.000	8	jenis	13.398.112	2	1.897.000	3	4.158.000				7	6.055.000	15	36.633.000	53,57	244,22		
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	120	76.458.000	37	61.978.000	30	item	42.412.378	7	11.393.646	9	22.797.874				30	34.191.520	67	96.169.520	55,83	125,78		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetak dan penggandaan yang disediakan	32	30.000.000	7	65.229.000	8	jenis	42.703.250	2	3.791.750	2	13.890.250				6	17.682.000	13	82.911.000	40,63	276,37		
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang tersedia	Jumlah Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	11.520	16.000.000	63	13.860.000	2.880	eks	16.000.000	240	720.000	240	3.135.000				480	3.855.000	543	17.715.000	4,71	110,72		
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang di jamu	3339	10.000.000	0	-	192	kotak	9.984.000	0	-	50	1.980.000				50	1.980.000	50	1.980.000	1,50	19,80		
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah Konsultasi SKPD yang dilakukan	70	364.157.000	2	64.705.500	15	kali	187.392.000	5	23.177.000	2	29.505.649				7	52.682.649	9	117.388.149	12,86	32,24		
				Jumlah rapat koordinasi yang dilakukan	384		2490	92.060.100	96	kali		24		24					48	-	2.538	92.060.100	660,94	#DIV/0!			
			10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip yang tersusun	3339	5.000.000	0	-	1	kegiatan	4.840.050	0	-	224	-				224	-	224	-	6,71	0,00		


No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket				
				5		6		7				8		9		10		11				12				13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp			K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5*100%		16	17		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan daerah	97	681.015.000	19	332.780.820	15	jenis	48.469.111				13.500.000					0	13.500.000								
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	60	319.000.000	2	20.640.800	9	unit	14.261.275	0	-	0	-					0	-	2	20.640.800	3,33	6,47				
		06	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	30	302.015.000	19	312.140.020	3	unit	14.828.620	0	-	3	13.500.000					3	13.500.000	22	325.640.020	73,33	107,82				
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	7	60.000.000	0	-	3	unit	19.379.216	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa Penunjang Urusan	60	2.264.282.794	100	275.174.644	12	bulan	511.619.560	3	79.905.728		118.500.391					3	198.406.119	103	473.580.763	171,67	20,92				
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materi yang disediakan	2850	22.500.000	1050	4.500.000	450	lembar	4.500.000	0	-	110	2.240.000					110	2.240.000	1.160	6.740.000	40,70	29,96				
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	144	1.510.322.794	12	182.574.644	36	rek/bulan	295.597.960	36	49.063.412	36	42.821.087					36	91.884.499	48	274.459.143	33,33	18,17				
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pelayanan Umum Kantor yang dibayarkan gajinya	390	731.460.000	6	88.100.000	6	orang/bulan	211.521.600	6	30.842.316	6	73.439.304					6	104.281.620	12	192.381.620	3,08	26,30				
	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan BMD penunjang urusan Pemerintahan Daerah	48	3.116.179.000	100	414.655.076	12	bulan	747.485.375	3	25.913.167	32	213.701.998					35	239.615.165	135	654.270.241	281,25	21,00				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang dipelihara rutin/berkala dan dibayarkan pajaknya	61	38.050.000	24	5.800.000	1	unit	19.000.000	1	920.000	1	9.307.300					2	10.227.300	26	16.027.300	42,62	42,12				
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara	107	759.761.000	22	124.005.650	22	unit	116.500.000	5	18.687.600	10	39.107.700					15	57.795.300	37	181.800.950	34,58	23,93				
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah mobiler yang mendapatkan pemeliharaan Rutin/ Berkala	61	38.050.000	24	5.800.000	6	unit	7.500.000	0	-		-					0	-	24	5.800.000	39,34	15,24				
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	110	123.600.000	14	20.100.000	21	unit	14.770.000	0	-		1.280.000					0	1.280.000	14	21.380.000	12,73	17,30				

No.	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3			4	5		6		7				8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5*100%		16	17
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah tenaga kebersihan yang diadakan	360	1.447.294.000	24	53.760.480	108	org/bln	21	6.305.567	21	161.041.998					42	167.347.565	66	221.108.045	18,33	15,28			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah alat kebersihan yang disediakan	115	120.594.000	23	56.793.000	20	jenis	0								0	-	23	56.793.000	20,00	47,09			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	8	485.300.000	2	123.445.946	3	unit	0								0	-	2	123.445.946	25,00	25,44			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	124	91.100.000	46	24.950.000	14	unit	8	-		2.965.000					8	2.965.000	54	27.915.000	43,55	30,64			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan kantor yang dipelihara	7	12.430.000	0	-	4	unit	0	-		-					0	-	0	-	0,00	0,00			
2	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase layanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan sesuai SOP	100	1.770.000.000	100	543.657.160	100		25	14.365.700		46.006.750				0	60.372.450	0	604.029.610	0,00	34,13				
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	2.01			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/ monitoring penyelenggaraan keg pemerintahan di tingkat Kecamatan	144	630.000.000	7	94.846.160	24		6	4.500.000		3.349.300				7	7.849.300	14	102.695.460	9,72	16,30				
			01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan fasilitas kebencanaan tingkat kelurahan yang dilakukan (kali)	96	170.000.000	5	58.926.160	24	kali/bulan	6	4.500.000		3.349.300				6	7.849.300	11	66.775.460	11,46	39,28				
			02		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/ pembinaan terkait administrasi pemerintahan	48	460.000.000	2	35.920.000	0	0	0	-	0	-	0	-	0	0	0	0	0	35.920.000	4,17	7,81			
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	2.02			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Admintrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	20	600.000.000	5	298.017.500	5	pelayanan	5	1.765.700		9.649.400				5	11.415.100	10	309.432.600	50,00	51,57				
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan		03		Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Admintrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani	20	600.000.000	5	298.017.500	5	pelayanan	5	1.765.700		9.649.400				5	11.415.100	10	309.432.600	50,00	51,57				

No.	Sasaran	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan (2022) yang dievaluasi				Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5		6		7				8		9		10		11		12		13= 6 + 12		14 = 13/5*100%		16	17
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah monitoring perizinan bangunan	96	540.000.000	4	150.793.500	24	kali/bulan	84.730.100	6	8.100.000		33.008.050					6	41.108.050	10	191.901.550	10,42	35,54		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan		01 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah monitoring perizinan bangunan	96	540.000.000	4	150.793.500	24	kali/bulan	84.730.100	6	8.100.000		33.008.050					6	41.108.050	10	191.901.550	10,42	35,54		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan	82	12.757.196.808	100	3.440.885.360	73	%	1.793.506.207	20	154.510.540		544.843.148						699.353.688		4.140.239.048	0,00	32,45		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	136	12.512.101.260	36	3.440.885.360	60	keg	1.769.520.407	17	154.510.540		544.843.148					17	699.353.688	0	4.140.239.048	0,00	33,09		
			01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah kegiatan rakorbang kelurahan dan musrenbang kecamatan yang dilaksanakan tepat waktu	32	600.000.000	8	54.340.000	8	keg	147.707.800	8	139.343.640	0	-					8	139.343.640	16	193.683.640	50,00	32,28		
			02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah lokasi sarana dan prasarana usulan masyarakat yang diakomodir	28	11.089.991.271	13	829.916.860	35	lokasi	1.248.117.857	7	-		503.473.498					7	503.473.498	20	1.333.390.358	71,43	12,02		
			03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan	28	652.109.989	12	2.543.121.500	5	keg	347.549.850	2	15.166.900		29.392.400					2	44.559.300	14	2.587.680.800	50,00	396,82		
			04 Evaluasi Kelurahan	Jumlah monitoring yang dilaksanakan	48	170.000.000	3	13.507.000	12	kali/bulan	26.144.900	0	-		11.977.250					0	11.977.250	3	25.484.250	6,25	14,99		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	4	245.095.548			1	keg	23.985.800	0	-							0	-						
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat yang dilaksanakan	4	245.095.548	0	-	1	keg	23.985.800	0	-	0	-					0	-	0	-	0,00	0,00		
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan Kecamatan	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pengaduan masyarakat terkait trantibum yang ditindaklanjuti	100	266.000.000	100	52.123.200	100	%	23.534.900	25	5.100.000	-	7.474.900					100	12.574.900	200	64.698.100	200	24,32		

No.	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Tahun Lalu (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024		Unit SKPD Penanggung jawab	Ket
				K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7								12		13= 6 + 12		14 = 13/5*100%		16	17
1	Faktor pendorong keberhasilan kinerja			1. Jelasnya informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang akan didapatkan, sehingga kegiatan dapat dipahami pelaksanaannya.																			
2	Faktor penghambat pencapaian kinerja			1. Masih ada beberapa rekening belanja yang salah penempatan pada sub kegiatan, sehingga menunggu perubahan anggaran baru bisa kegiatan dilaksanakan 2. keterlambatan PPTK dalam menyiapkan SPJ kegiatan karena faktor rekanan dan SDM belum memadai.																			
3	Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya			1. Rapat evaluasi pencapaian program/ kegiatan/ sub kegiatan agar masing-masing PPTK melaksanakan kegiatan yang tertunda di triwulan 2 di triwulan berikutnya																			

Disusun
Padang, 1 Juli 2021
Camat Padang Utara



FAJAR SUKMA, SPd
Pembina / Nip. 19720601 200801 1 002

Dievaluasi
Padang, Juli 2021
Kepala Bappeda Kota Padang

YENNI YULIZA, ST, MT
Pembina Tk. 1 / Nip. 19710603 199803 2 003